



UNIVERSITAS INDONESIA

GOOD GOVERNANCE DAN HAK ASASI MANUSIA
DALAM PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

TESIS

Oleh:

ACHMAD FAUZAN
NPM: 0806424850

PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JAKARTA
2010



UNIVERSITAS INDONESIA

GOOD GOVERNANCE DAN HAK ASASI MANUSIA
DALAM PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum

ACHMAD FAUZAN
NPM: 0806424850

PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JAKARTA
2010

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Achmad Fauzan

NPM : 0806424850

Tanda Tangan :



Tanggal : 21 Juni 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Achmad Fauzan
NPM : 0806424850
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : *Good Governance* dan Hak Asasi Manusia dalam
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Safri Nugraha, S.H.,LLM.,Ph.D. (.....)

Penguji : Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Dr. Wukir Ragil SH., M.Ed (.....)

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 21 Juni 2010

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

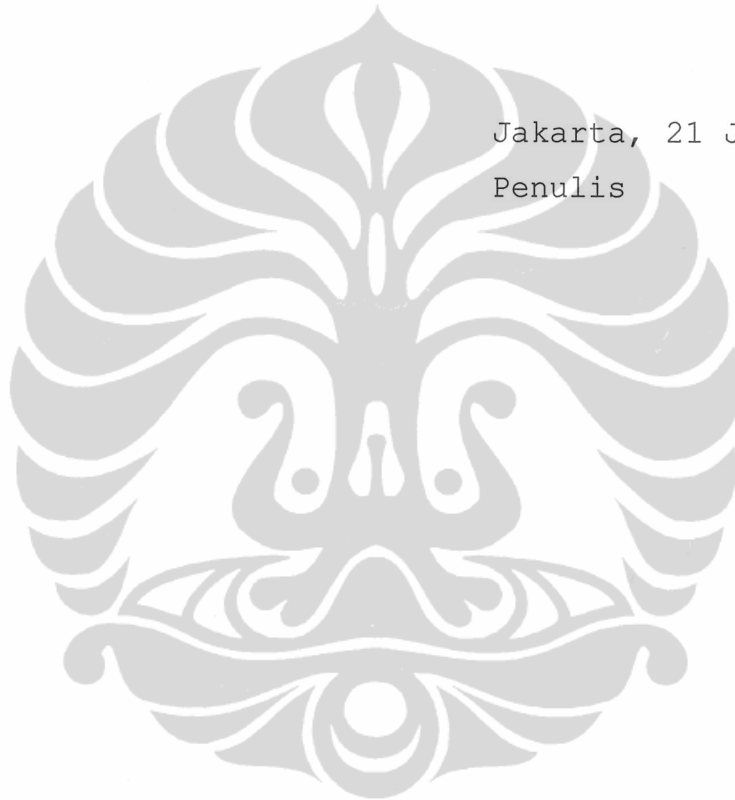
1. Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
2. Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H yang telah banyak mengajarkan tentang Hak Asasi Manusia dalam setiap perkuliahan.
3. Dr. Wukir Ragil SH., M.Ed yang telah memberikan banyak materi tentang Hukum Administrasi Kepegawaian.
4. Istri dan anak-anak saya yang telah memberikan bantuan dukungan secara moril sehingga saya dapat bersemangat untuk menyelesaikan tesis ini;
5. Orang tua dan seluruh keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moril;
6. Teman-Teman di Sekretariat Magister Hukum Universitas Indonesia untuk semua bantuannya selama 2 tahun, sehingga saya bisa menyelesaikan tesis ini;
7. Teman-Teman Mahasiswa angkatan 2008 Magister Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak memberikan masukan dalam penulisan tesis ini; dan

8. Sahabat-Sahabat lainnya yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Saran dan masukan yang baik tentu sangat kami harapkan demi menambah pengetahuan dan penyempurnaan makalah ini. Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 21 Juni 2010

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Fauzan
NPM : 0806424850
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Good Governance dan Hak Asasi Manusia dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Juni 2010
Yang menyatakan

(Achmad Fauzan)

ABSTRAK

Nama : Achmad Fauzan
Program Studi : Magister Hukum
Judul : *Good Governance* dan Hak Asasi Manusia
dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Setiap Warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dalam prakteknya rawan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). *Good Governance* dipandang sebagai paradigma baru dan menjadi ciri yang perlu ada dalam pengelolaan administrasi publik. Selain itu, negara berkewajiban melindungi Hak Asasi Manusia terhadap semua warganya untuk mendapatkan kesempatan yang sama.

Penelitian ini melihat hubungan antara *Good Governance* dan Hak Asasi Manusia dalam pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil dapat berpeluang menimbulkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, karena aturan pelaksanaannya kurang ketat untuk menerapkan prinsip *Good Governance* yaitu asas transparansi dan akuntabilitas. Meskipun secara persyaratan pengadaan Pegawai Negeri Sipil tidak ditemukan persyaratan yang bersifat diskriminatif. Pada prakteknya, peluang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dapat timbul dari proses pemeriksaan lembar jawaban komputer, yaitu adanya manipulasi. Jika hal ini terjadi akan mengakibatkan masyarakat kelas bawah atau yang tidak punya akses terhadap pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil tersebut menjadi terdiskriminasi. Hal ini akan mengurangi Hak Asasi Manusia sebagai warga negara untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan.

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil akan selalu berhubungan dengan *Good Governance*. Jika *Good Governance* diterapkan dalam setiap pengadaan Pegawai Negeri Sipil, tidak akan ada Warga Negara yang Hak Asasi Manusianya dilanggar. Tetapi, jika tidak menerapkan *Good Governance*, maka akan melanggar Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan kesempatan yang sama menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Kata Kunci:

good governance, transparansi, akuntabilitas, hak asasi manusia, diskriminasi

ABSTRACT

Name : Achmad Fauzan
Study Program : Master of Law
Title : Good Governance and Human Rights in the
Procurement of Civil Servants

Every citizen of the Republic of Indonesia have the same opportunity to apply as a Civil Servant. Procurement of Civil Servants in practice sensitive to corruption, collusion and nepotism. Good Governance is seen as a new paradigm and a feature that should exist in the management of public administration. In addition, the state is obliged to protect the human rights of all citizens to get equal opportunities.

This study observes the relationship between Good Governance and Human Rights in the procurement of Civil Servants.

This study uses Normative Legal Research.

Results showed that in the procurement process of Civil Servant can potentially lead to corruption, collusion and nepotism, because its implementation is less stringent rules to implement the principles of good governance principles of transparency and accountability. Although the procurement requirements of Civil Servants can not find the requirements are discriminatory. In practice, the chance of Corruption, Collusion and Nepotism may arise from the process of checking a computer answer sheet, namely the manipulation. If this happens will result in lower classes of society or who have no access to the procurement of Civil Servants has become discriminated. This will reduce the Human Rights as a citizen to obtain equal opportunities in obtaining employment.

Procurement of Civil Servants will always be associated with good governance. If good governance is applied in every procurement of Civil Servants, there will not be a citizen of Human Rights are violated. But, if it does not apply Good Governance, it will violate the Human Rights to get the same opportunity to be Civil Servants.

Key Words :

good governance, transparency, accountability, human rights, discrimination

DAFTAR TABEL

TABEL 1 Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara	23
TABEL 2 Perbedaan Government dan Governance	24



DAFTAR ISI

Cover	i
Halaman Pernyataan Orosinalitas	ii
Halaman Pengesahan	iii
Ucapan Terima Kasih	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi	
Tugas Akhir untuk Kepentingan Akademis	vi
Abstrak	vii
Abstract	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Isi	x
1. Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	9
1.3. Tujuan Dan Manfaat	9
1.4. Metode	9
1.5. Definisi Operasional	10
1.6. Sistematika Laporan	13
1.7. Landasan Teori	14
1.7.1. <i>Good Governance</i>	14
1.7.2. Hak Asasi Manusia	26
1.7.3. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil	33
2. Bab II GOOD GOVERNANCE DAN PROSEDUR PENGADAAN PNS	46
2.1. Good Governance	46
2.2. Perencanaan Pengadaan	58
2.2.1. Penyiapan Formasi	59
2.2.2. Penyiapan Materi	69
2.3. Pengumuman dan Pelamaran	70
2.3.1. Pengumuman	70
2.3.2. Pelamaran	72
2.4. Ujian Penyaringan	75
2.5. Pengolahan Hasil Ujian	76
2.6. Pengumuman Pelamar Yang Diterima	78
2.7. Pengangkatan	80
2.8. Pengangkatan Tenaga Honorer	84
2.9. Pengangkatan Sekretaris Desa	89
3. Bab III HAM DALAM PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	95
3.1. Syarat Melamar Menjadi PNS	95
3.2. Pembatasan Umur	99
3.3. Pembatasan Tidak Pernah Dihukum Pidana	103
3.4. Pembatasan Sehat Jasmani Dan Rohani	106
3.5. Diskriminasi Dalam Proses Seleksi	112
3.5.1. Buruknya Sistem Seleksi	114
3.5.2. Peluang Terjadinya KKN	117

4. Bab IV REFORMASI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	126
4.1. Akuntabilitas Kualifikasi Jabatan	127
4.2. Transparansi Hasil Ujian	131
4.3. Partisipasi Publik	139
5. Bab V PENUTUP	145
5.1. Kesimpulan	145
5.2. Saran	148
6. DAFTAR PUSTAKA	151
LAMPIRAN	160
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS	

